Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa ijin adalah tindakan ilegal.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 213/PMK.03/2018

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa masih terdapatnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang sudah tidak relevan, tidak sesuai dengan kondisi saat ini, bersifat kadaluwarsa, dan/atau tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya;
- bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan kemudahan di dalam pelaksanaan berbagai aturan di bidang pajak penghasilan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta selaras dengan program simplifikasi regulasi untuk mendukung percepatan Rencana Kerja Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Pajak Penghasilan;

Mengingat :

[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Keempat atas [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983](#) tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 1

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 957/KMK.04/1983 tentang Penentuan Bidang-Bidang Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [1228/KMK.011/1984](#) tentang Penyempurnaan Keputusan

Peraturan Menteri Keuangan, 213/PMK.03/2018

- Menteri Keuangan Nomor 957/KMK.04/1983 tentang Penentuan Bidang-Bidang Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Tidak Termasuk Sebagai Obyek Pajak dari Pajak Penghasilan;
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [965/KMK.04/1983](#) tentang Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarif, serta Tata Cara Pelaksanaannya;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [456/KMK.012/1984](#) tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyetoran Kewajiban Pertamina Kepada Pemerintah atas Hasil Operasi Pertamina Sendiri;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [458/KMK.012/1984](#) tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [815/KMK.012/1985](#) tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [458/KMK.012/1984](#) tentang Tata Cara Perhitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan yang Terutang oleh Kontraktor Yang Mengadakan Kontrak Production Sharing Dalam Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [714/KMK.04/1984](#) tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [715/KMK.04/1984](#) tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pekerja Tenaga Asing yang Bekerja pada Wajib Pajak Badan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi di Indonesia;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [84/KMK.04/1986](#) tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan yang Melakukan Kegiatan Usaha di Bidang Pengeboran Minyak dan Gas Bumi serta Angsuran Pajak Dalam Tahun Berjalan oleh Wajib Pajak Sendiri;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [356/KMK.04/1986](#) tentang Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Tenaga Ahli atau Persekutuan Tenaga Ahli Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Berupa Honorarium atau Pembayaran Lain Sebagai Imbalan atas Jasa Profesi yang Dilakukan di Indonesia;
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [759/KMK.04/1986](#) tentang Besarnya Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas bagi Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan;
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [828/KMK.04/1986](#) tentang Pelaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;
- k. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [830/KMK.04/1986](#) tentang Pembebasan dari Pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) bagi Warga Negara Indonesia yang Bertempat Tinggal Tetap di Luar Wilayah Republik Indonesia;
- l. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [914/KMK.04/1986](#) tentang Pelaksanaan [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986](#) tentang Penyesuaian Harga atau Nilai Perolehan Harta Berkenaan dengan Perubahan Nilai Tukar Rupiah;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [1442/KMK.04/1988](#) tentang Pengembalian Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito dan Tabungan;
- n. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [78/KMK.01/1990](#) tentang Faktor Penyesuaian Tahun 1989 untuk Penghitungan Pajak Penghasilan;
- o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [747/KMK.04/1990](#) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Investasi di Wilayah Tertentu;
- p. Keputusan Menteri Keuangan [770/KMK.04/1990](#) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Latihan Karyawan, Pemagangan dan Bea Siswa;
- q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [1075/KMK.04/1992](#) tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1992;
- r. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [632/KMK.04/1993](#) tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1993;
- s. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [795/KMK.04/1993](#) tentang Besarnya Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha atau Penerimaan Bruto Pekerjaan Bebas bagi Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma Penghitungan;
- t. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [928/KMK.04/1993](#) tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- u. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [422/KMK.04/1994](#) tentang Faktor Penyesuaian untuk Penghitungan Pajak Penghasilan dari Penjualan atau Pengalihan Harta Tahun 1994;
- v. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [604/KMK.04/1994](#) tentang Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan;
- w. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [649/KMK.04/1994](#) tentang Organisasi Internasional yang Tidak Berkewajiban Memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Ayat (1) Huruf d;

Peraturan Menteri Keuangan, 213/PMK.03/2018

- x. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [505/KMK.04/1995](#) tentang Pegangan Penyusunan Norma Penghitungan Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- y. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [61/KMK.016/1996](#) tentang Bantuan Badan Usaha Milik Negara untuk Pembinaan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I;
- z. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [597/KMK.04/1997](#) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Selisih Kurs Valuta Asing Dalam Tahun 1997;
- a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [44/KMK.04/1998](#) tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996](#) sebagaimana telah diubah dengan [Keputusan Menteri Keuangan Nomor 358/KMK.04/1999](#) tentang Perubahan atas KMK [44/KMK.04/1998](#) tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Wajib Pajak Badan untuk Usaha Industri Tertentu Sesuai [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996](#);
- b. Keputusan Menteri Keuangan [361/KMK.04/1998](#) tentang Faktor Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [83/KMK.04/1999](#) tentang Penyusutan atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang Melakukan Kontrak bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor;
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [391/KMK.04/2000](#) tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [499/KMK.03/2003](#) tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [391/KMK.04/2000](#) tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan ke Luar Negeri Dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang Akan Bertolak ke Luar Negeri Dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional ASEAN;
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [571/KMK.04/2000](#) tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan kepada Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [113/KMK.03/2001](#) tentang Pemberian Keringanan Pajak Penghasilan Kepada Wajib Pajak yang Melakukan Restrukturisasi Utang Usaha Melalui Lembaga Khusus yang Dibentuk Pemerintah;
- g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor [486/KMK.03/2003](#) tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja dari Pekerjaan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [609/PMK.03/2004](#) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
- i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [14/PMK.03/2005](#) tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [137/PMK.03/2005](#) tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [93/PMK.03/2006](#) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [94/PMK.03/2006](#) tentang Persyaratan Sumbangan serta Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan oleh Penampung, Penyalur, dan/atau Pengelola Sumbangan Dalam Rangka Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah Serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [01/PMK.03/2007](#) tentang Penyesuaian Besarnya Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Boleh Menghitung Penghasilan Neto dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; dan
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [124/PMK.011/2013](#) tentang Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak Industri Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1066),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1858

Dokumen ini diketik ulang dan diperuntukan secara eksklusif untuk www.ortax.org dan TaxBaseX. Pengambilan dokumen ini yang dilakukan tanpa izin adalah tindakan ilegal.